



Judul : DPR dan Kemenkeu Dukung KPK  
Tanggal : Selasa, 08 Mei 2018  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 5

## DPR dan Kemenkeu Dukung KPK

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menganggap tertangkapnya salah satu anggota DPR dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebagai tamparan bagi lembaganya. Oleh karena itu, pria yang disapa Bamsoet itu berjanji untuk membenahi internal DPR, termasuk melakukan penyusunan anggaran yang lebih transparan.

"Bersama MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), pimpinan DPR tengah berupaya menegakkan kode etik anggota dewan, termasuk keterbukaan atau transparansi dalam pembahasan anggaran dan konsistensi menegakkan kode etik," kata Bamsoet di Jakarta, kemarin.

Ia melanjutkan bahwa DPR tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi. Pihaknya juga meminta kepada para anggotanya untuk mematuhi ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja mereka untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

OTT KPK yang dimaksud Bamsoet dilakukan pada Sabtu (5/5) lalu. Salah satu anggota Komisi Keuangan DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, ditangkap dalam dugaan suap terkait dengan penerimaan hadiah atau janji dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan 2018.

Informasi soal dugaan suap itu diketahui KPK terjadi di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma pada Jumat (4/5) malam. Pertemuan tersebut melibatkan anggota komisi XI DPR berinisial AMS (Amin Santono) dengan EKK (Eka Kamaluddin), YP (Yaya Purnomo), dan AG (Ahmad Ghiast).

KPK menetapkan empat tersangka, yakni Amin Santono, Eka Kamaluddin, dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu, pengepul, yaitu Ahmad Ghiast, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Amin langsung dipecat Partai Demokrat, sedangkan Yaya Purnomo dibebastugaskan Kementerian Keuangan dari jabatan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Kami membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari keanggotaan PNS (pegawai negeri sipil). Hari ini kami sampaikan SK (surat keputusan) pembebasan yang bersangkutan dari jabatan yang akan diteken Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Budiarto Teguh Widodo, di Jakarta, kemarin. (Nov/Tes/P-4)